



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 900/3/1.3/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH,

- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) (sebagaimana terlampir);
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana diktum KESATU tersebut bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah atas kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Penatausahaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada APBD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH,
Auditor Aidi Madya



Tembusan:

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang Bersangkutan.

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
I	NUR ROHMAT, S.Sos, MSi NIP. 19690505 198903 1 008 Sekretaris	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
II 1.	SRI RAHAYUNINGSIH, SE, MM NIP. 19671113 199110 2 001 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Desa Antikorupsi)</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Keuangan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2. Fasilitasi Kunjungan Tamu 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Desa Antikorupsi) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Sertifikasi APIP) 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKPN & LHKASN) 3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</p>
2.	SODIKUN, S.E., M.SE., MA. NIP. 19740618 199511 1001 Kepala Sub Bagian Perencanaan	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah (Irbn Pemerintahan Daerah) 2. Reviu Laporan Kinerja (Irbn Pemerintahan Daerah) 3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Irbn Pemerintahan Daerah) 4. Reviu Laporan Keuangan (Irbn Akuntabilitas) 5. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah (Irbn Kinerja) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbn Akuntabilitas)</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (PKPT) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (SPIP)</p>
3.	BAGUS PANUNTUN, S.STP, MA NIP. 19871119 200602 1 001 Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbansus) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIP Evaluasi RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</p>

NO	NAMA	KEDUDUKAN
		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Evaluasi RB; Kapabilitas APIP; Korwas; Telaah Sejawat; Forum APH & APIP) 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)</p>
III 1. 2. 3. 4. 5.	1. ADAM ARIK PRASOJO, A.Md.Ak. NIP. 20000223 202101 1 001 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum 2. HENDYAWAN KRISNANTO NIP. 19771227 201001 1 009 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum 3. SRI RATNASARI, SH, M.Si. NIP. 19761201 200701 2 021 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum 4. PENGGING RELO PRIHATIN, S.Sos. NIP. 19970325 202203 1 003 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum 5. AGUNG SETYO NUGROHO, S.Mn. NIP. 19860515 201101 1 014 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum	<p>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun Laporan Keuangan - Pengurus Barang - Verifikator - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Perbendaharaan) - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)
IV 1.	1. WORO ENDAH SEPTIARTI, SE NIP. 19800922 200903 2 003 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum	<p>Bendahara Pengeluaran : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan Penataan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penataan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paik dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan</p> <p>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (LHKPN & LHKASN)</p>
2.	2. DIFTA ANDINA, SE NIP. 19940702 201902 2 005 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah (Irbn Pemerintahan Daerah) 2. Reviu Laporan Kinerja (Irbn Pemerintahan Daerah) 3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Irbn Pemerintahan Daerah)</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p>
3.	3. SUTARTINI, SE NIP. 19680218 199003 2 003 Staf subag Administrasi dan Umum Umum	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Reviu Laporan Keuangan (Irbn Akuntabilitas) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbn Akuntabilitas)</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (SPIP)</p>
4.	4. SHOLIHIN NIP. 19741103 200801 1 006 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah (Irbn Kinerja) 2. Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIP Evaluasi RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</p>

NO	NAMA	KEDUDUKAN
		<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Evaluasi RB: Kapabilitas APIP; Korwas: Telaah Selawat: Forum APH & APIP) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PKI)
5.	<p>SUYATMININGSIH, SE NIP. 19680218 199003 2 003 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbansus) <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	<p>ADAM ARIK-PRASOJO, A.Md.Ak. NIP. 20000223 202101 1 001 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum</p>	<p>Pembantu Bendahara Pengeluaran: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Sertifikasi APIP)
7.	<p>PENGGING RELO PRIHATIN, S.Sos. NIP. 19970325 202203 1 003 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum</p>	<p>Pembantu Bendahara Pengeluaran: PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas
8.	<p>AGUNG SETYO NUGROHO, S.Mn NIP. 19860515 201101 1 014 Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum</p>	<p>Pembantu Bendahara Pengeluaran: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

